

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kepolisian adalah suatu institusi yang memiliki ciri universal yang dapat ditelusuri dari sejarah lahirnya polisi baik sebagai fungsi maupun organ. Pada awalnya polisi lahir bersama masyarakat untuk menjaga sistem kepatuhan (konformitas) anggota masyarakat terhadap kesepakatan antar warga masyarakat itu sendiri terhadap kemungkinan adanya penyimpangan perilaku dan perilaku kriminal dari masyarakat. Ketika masyarakat bersepakat untuk hidup di dalam suatu negara, pada saat itulah polisi dibentuk sebagai lembaga formal yang disepakati untuk bertindak sebagai pelindung dan penjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Kehadiran polisi sebagai organisasi sipil yang dipersenjatai agar dapat memberikan efek pematuhan.¹

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, kepolisian adalah segala hal-hal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kepolisian merupakan salah satu institusi negara yang memiliki tujuan utama untuk menciptakan rasa aman bagi masyarakat. Sebagai institusi pelindung masyarakat, aparat kepolisian haruslah memberikan contoh yang baik dalam menciptakan rasa aman tersebut, yaitu dalam menjalankan tugas serta kewajibannya aparat kepolisian senantiasa harus bertindak

¹Bibit Samad Rianto. 2006. *Pemikiran Menuju POLRI Yang Profesional, Mandiri, Berwibawa Dan Dicintai Rakyat*. Jakarta: PTIK Press & Restu Agung, hal. 36

berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Penegakan hukum dalam hubungannya dengan tugas polisi adalah penegakan hukum pidana. Tugas Polisi senantiasa diukur dengan upaya menciptakan rasa keadilan masyarakat bukan rasa individu perorangan. Pengambilan keputusan yang dilakukan oleh polisi menyangkut masalah ketertiban dan keamanan masyarakat yang erat kaitannya dengan hak asasi manusia, terkadang ada beberapa oknum polisi yang keliru mengambil keputusan guna mencegah suatu masalah dan akibatnya ada anggota masyarakat tertentu merasa dilanggar hak-haknya dan memberikan tanggapan yang negatif kepada polisi. Berbagai pertanyaan timbul dikalangan masyarakat mengenai alasan dari seorang polisi menggunakan kekerasan, tidak tanggap, serta kurang melindungi dan mengayomi masyarakat. Kondisi tersebut dilatar belakangi oleh bagaimana pelaksanaan perangkat hukum di lapangan, khususnya tindakan kepolisian di tempat kejadian perkara yang dapat diukur dari standart kualitas kemampuan profesi kepolisian ataupun ketidak mampuan institusi kepolisian dinilai oleh masyarakat dalam menghadapi pelaku-pelaku kejahatan sering menggunakan tindakan kekerasan yang tidak jarang menimbulkan korban jiwa dari warga masyarakat.

Setiap melakukan tindakan, aparat kepolisian mempunyai kewenangan bertindak menurut penilaiannya sendiri dan hal inilah yang terkadang disalahgunakan oleh aparat kepolisian. Kewenangan ini diatur dalam

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu:

Pasal 15 ayat (2) huruf k disebutkan bahwa “Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian”.

Pasal 16 ayat (1) huruf l disebutkan bahwa “Dalam rangka menjalankan tugas dibidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab”

(2) Tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf l adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. tidak bertentangan dengan suatu hukum .
- b. selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan.
- c. harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya.
- d. pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa, dan
- e. menghormati hak asasi manusia.

Pasal 18

(1) Untuk kepentingan umum, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.

(2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Selain itu dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang berhubungan dengan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana menunjuk adanya tindakan lain berdasarkan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan, juga diatur mengenai kewenangan yang dimiliki oleh polisi untuk bertindak menurut penilaiannya sendiri, yaitu dalam pasal 7 ayat(1) huruf j KUHAP yang memberikan

wewenang kepada penyidik yang karena kewajibannya dapat melakukan tindakan apa saja menurut hukum yang bertanggung jawab.

Pasal-pasal tersebut adalah merupakan dasar dari kewenangan diskresi. Pengertian diskresi kepolisian menurut *Thomas J. Aaron* adalah “Suatu wewenang yang diberikan kepada polisi, untuk mengambil keputusan dalam situasi tertentu yang membutuhkan pertimbangan sendiri dan menyangkut masalah moral, serta terletak dalam garis batas antara hukum dan moral”.²

Dalam penerapan di lapangan biasanya Polisi melakukan tindakan tembak ditempat terhadap tersangka dan pada dasarnya pemberlakuan tembak ditempat terhadap tersangka bersifat situasional, yaitu berdasarkan pada prinsip proporsionalitas dalam penanggulangan kekerasan dan penggunaan senjata api harus diterapkan pada saat keadaan tertentu. Seperti berita berikut :

MALANG - Tim Buru Sergap Satuan Reserse dan Kriminal Kepolisian Resor Malang Kota menembak mati dua pelaku pencurian kendaraan roda empat, pada Jumat 27 Februari 2015 malam.

Dua pelaku yang ditembak adalah Luddin (47), warga Jalan Mawar, Kota Malang, dan Satori (44), asal Pamekasan, Madura. Keduanya tewas setelah tertembak timah panas petugas di bagian dada.

Selain mereka, petugas juga menembak Ahmad Sulaiman (32), warga Lowokwaru, Kota Malang. Sulaiman ditembak di bagian kakinya, karena mencoba kabur dari sergapan petugas.

Kapolres Malang Kota AKBP Singgamata mengatakan, penyergapan komplotan ini diawali dari penyelidikan petugas atas laporan hilangnya mobil Suzuki Carry di wilayah Kecamatan Blimbing, dan mobil pikap L300 di kawasan Lowokwaru, pada Jumat pagi.

² M.Faal. 1991. *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)*. Jakarta: Pradnya Paramita, hal.16.

Dari hasil penyelidikan, ditemukan lokasi persembunyian mereka di daerah Pakis, Malang. Petugas lalu menguntit mereka dan ditemukan rumah yang diduga jadi kontrakan L, dan AS (Ahmad Sulaiman) di daerah Pakis.

"Ada lagi kontrakan mereka di wilayah Blimbing, Kota Malang," kata Kapolres Malang Kota AKBP Singgamata, kepada wartawan, Sabtu (28/2/2015).

Petugas lalu menyergap mereka di lokasi dan menggelandang mereka ke rumah kontrakan di daerah Blimbing. Di sini, petugas menangkap Satori, dan Syamsul Arifin (31). Aksi petugas mendapat perlawanan dengan mengancam petugas.

Terjadi kejar-kejaran antara Polisi dan pelaku, hingga petugas memberi tembakan peringatan. Namun tidak dihiraukan, dan pelaku malah melawan. "Kami akhirnya melumpuhkan mereka, dan tindakan anggota sudah sesuai prosedur," pungkasnya.³

Untuk itu polisi dalam menangani kasus yang bersifat individual diperlukan tindakan individual pula. Berdasarkan karakter profesi yang seperti itu, kepolisian memberlakukan prinsip atau asas diskresi. Dengan prinsip diskresi ini, seorang polisi boleh dan dapat mengambil keputusan dan tindakan sendiri, berdasarkan pertimbangan individual.

Seorang polisi yang sedang melakukan operasi dapat memutuskan sendiri, apakah ia perlu menembak atau tidak. Setelah ia memutuskan untuk "menarik pelatuk" atau "tidak menarik pelatuk" maka anggota Polisi yang bersangkutan akan mempertanggung jawabkan keputusannya kepada atasannya.

Berdasarkan uraian diatas, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk penulisan hukum dengan judul **"Tinjauan Yuridis Sosiologis Penerapan "Alasan Pembena" Dalam Tindakan Petugas**

³ Hari Setiawan, polisi tembak mati 2 pencuri mobil di malang, dalam <http://daerah.sindonews.com>, diakses 4 April 2017.

Kepolisian Melakukan Tembak Di Tempat Terhadap Pelaku Kejahatan (Studi di Polres Malang Kota)”.

B. Rumusan Masalah

Dalam suatu penelitian, perumusan masalah merupakan hal yang penting. Agar dalam penelitian dapat lebih terarah dan terperinci sesuai dengan tujuan yang dikehendaki. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana standar yang digunakan oleh kepolisian dalam menetapkan alasan pembeda terkait dengan tindakan tembak di tempat terhadap pelaku kejahatan?
2. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban hukum petugas kepolisian yang melakukan tindakan tembak di tempat?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan memahami standar yang digunakan oleh kepolisian dalam menjadikan alasan pembeda terkait dengan tindakan tembak di tempat terhadap pelaku kejahatan.
2. Untuk mengetahui dan memahami bentuk pertanggungjawaban secara hukum terhadap petugas kepolisian yang melakukan tindakan tembak di tempat.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai penulis, maka manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

- a. Diharapkan memberikan gambaran yang berguna bagi pengembangan dan penelitian secara lebih jauh terhadap ilmu hukum yang berkaitan dengan tugas dan kewenangan aparat kepolisian dalam pelaksanaan tembak di tempat.
- b. Diharapkan sebagai telaah, bahan koreksi dan dapat menjadi kontribusi untuk menunjang proses belajar mengajar dan penelitian lanjutan di Perguruan Tinggi.

2. Manfaat Praktis

- a. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih sebagai bahan masukan serta untuk memberikan kontribusi pemikiran kepada instansi yang terkait yaitu pihak yang berwenang dalam menerapkan hukum.
- b. Menjadi sumbangsih sebagai bahan masukan serta memberikan informasi kepada masyarakat mengenai kewenangan kepolisian serta pelaksanaannya.

E. Kegunaan Penelitian

Atas dasar maksud, tujuan dan alasan sebagaimana yang penulis uraikan diatas maka, penulis berharap penelitian ini akan memiliki kegunaan sebagai berikut :

1. Secara Akademik

Berguna untuk mengembangkan ilmu hukum yang lebih luas dibidang ilmu hukum pidana.

2. Bagi Penulis

- a. Karya tulis ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dalam rangka menunjang pengembangan ilmu bagi penulis khususnya, mahasiswa fakultas hukum dan seluruh masyarakat indonesia pada umumnya.
- b. Untuk memenuhi tugas dan syarat akademis untuk mendapat gelar Sarjana Strata 1 (S1) di bidang Ilmu Hukum.

3. Bagi Masyarakat

Agar masyarakat mempunyai pandangan terhadap tindakan-tindakan aparat kepolisian dan lebih mengerti tentang proses tindakan tembak ditempat yang dilakukan oleh Polri.

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan secara yuridis sosiologis, yakni melihat hukum sebagai perilaku manusia dalam masyarakat.

2. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi yang dipilih penulis untuk menyelesaikan penulisan hukum adalah Polres Malang Kota yang terletak di Jl. Jaksa Agung Suparto No. 19 Malang Jawa Timur. Alasan pemilihan lokasi tersebut adalah penulis akan mendapatkan data yang akurat serta informasi - informasi guna untuk melengkapi bahan penulisan hukum.

3. Sumber Data

Dalam penulisan ini penulis menggunakan beberapa sumber data sebagai berikut :

a. Sumber Data Primer

Data Primer adalah jenis data, dokumen tertulis, file, rekaman, informasi, pendapat dan lain-lain yang diperoleh dari sumber yang utama. Dan yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan Iptu Edy Suprpto Kepala Unit Pidana Umum Reskrim Polres Malang Kota.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder pada penulisan ini adalah data hukum yang diperoleh melalui studi kepustakaan dengan mempelajari perundang-undangan yang berlaku, buku-buku yang berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Yaitu memperoleh dan mengumpulkan data melalui tanya jawab, serta diskusi dengan pihak terkait yang mana disini adalah Iptu Edy Suprpto Kepala Unit Pidana Umum Reskrim Polres Malang Kota.

b. Studi Dokumentasi

Yaitu terkait dengan data-data dalam bentuk dokumen yang diperoleh secara langsung (primer) atau data dari Polres Malang Kota diantaranya adalah :

1. Struktur Organisasi Satuan Reskrim Polres Malang Kota.

2. Data tindakan tembak di tempat Sat Reskrim Polres Malang Kota.

5. Teknik Analisa Data

Dengan data yang terkumpul dianalisa menggunakan analisa Deskriptif Kualitatif yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini guna memberikan pemahaman yang jelas dan terarah yang diperoleh dari hasil penelitian nantinya, sehingga diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas tentang simpulan atas hasil penelitian yang dicapai.

G. Sistematika Penulisan

Pada penelitian yang akan dibuat oleh penulis terdapat 4 Bab yang akan membantu penulis dan pembaca untuk memahami isi dari penelitian yang diangkat oleh penulis. Adapun sistematika penulisannya sebagai berikut :

1. BAB I PENDAHULUAN

Pada bab pertama ini memuat hal-hal yang melatarbelakangi penulis dalam memilih judul skripsi serta menjadi dasar pengantar umum dalam memahami penulisan skripsi ini. Pada bab I berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab II ini memuat penjelasan dari teori - teori yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yang digunakan untuk membantu penulis dalam membahas permasalahan yang diangkat oleh penulis.

3. BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab III ini berisikan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan dalam permasalahan yang diangkat oleh penulis yaitu tentang Tinjauan Yuridis Sosiologis Penerapan “Alasan Pembena” Dalam Tindakan Petugas Kepolisian Melakukan Tembakan Di Tempat Terhadap Pelaku Kejahatan (Studi Di Polres Malang Kota).

